

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa transportasi atau angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Selain itu transportasi dapat diartikan juga sebagai kegiatan yang memungkinkan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari pengertian tersebut, maka setiap transportasi mengakibatkan terjadinya perpindahan dan pergerakan yang berarti terjadi lalu lintas (Soerjono et al, 1990).

Transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan suatu perpindahan setiap hari. Transportasi juga memegang peranan dalam memajukan perekonomian suatu daerah dan perekonomian nasional. Dalam pelayanan mobilitas masyarakat dibutuhkan adanya moda angkutan. Selain untuk menunjang mobilitas masyarakat, moda angkutan pun menjadi penunjang perekonomian nasional.

Tarif adalah besaran biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. Penetapan tarif dimasukkan untuk mendorong terciptanya penggunaan prasarana dan sarana pengangkutan secara optimum dengan mempertimbangkan lintasan yang bersangkutan (Departemen Perhubungan, 2002). Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang. Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas tarif kelas ekonomi dan tarif kelas nonekonomi.

Tarif yang berlaku di Indonesia berlaku beberapa jenis tarif, tarif angkutan berbeda untuk setiap alat angkutannya. Tarif angkutan itu diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan dan pedoman tarif yang berlaku terdiri dari tarif angkutan barang dan tarif angkutan penumpang. Bagi angkutan penumpang berlaku tarif tetap (*fixed rate*) dengan jalur trayek yang dilayani oleh bis atau mobil penumpang umum angkutan perkotaan.

Angkutan umum merupakan moda angkutan yang dapat melayani mobilitas masyarakat. Salah satu angkutan umum yang ada di Kota Parepare ialah angkutan perkotaan. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah perkotaan.

Kota Parepare adalah kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan mempunyai luas wilayah $\pm 99,33 \text{ km}^2$. Angkutan Perkotaan di Kota Parepare memiliki 5 trayek yang masih beroperasi, panjang trayek terjauh yaitu Trayek Lapadde sebesar 7,9 km dan panjang trayek terdekat yaitu Trayek Soreang sebesar 2,7 km. Dalam penyelenggaraan operasional angkutan perkotaan di Kota Parepare diperlukan penetapan tarif untuk pengguna jasa. Dari sisi Regulator, Pemerintahan Kota Parepare telah menetapkan tarif berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 678 Tahun 2022 dimana pada peraturan tersebut telah ditetapkan tarif angkutan perkotaan di Kota Parepare baik trayek dengan jarak perjalanan pendek maupun trayek dengan jarak perjalanan jauh yaitu Rp 7.000. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara operator dengan pengguna jasa (penumpang) karena keputusan tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak yang lainnya dirugikan serta dapat berdampak pada minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perkotaan.

Maka dari itu perlu diadakan evaluasi dan analisis terhadap tarif angkutan perkotaan di wilayah studi Kota Parepare yang dilihat dari sisi regulator, sisi operator, dan sisi penumpang (pengguna jasa). Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan suatu penelitian dengan judul **"Evaluasi Tarif Angkutan Perkotaan Di Kota Parepare"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka didapatkan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat pemberlakuan tarif datar semua trayek yang memiliki jarak perjalanan yang berbeda beda.
2. Tarif yang ditetapkan pemerintah belum sesuai dengan keinginan penumpang dalam membayar angkutan perkotaan Kota Parepare.
3. Pendapatan operator belum mampu menutupi biaya operasional kendaraan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tarif kondisi saat ini dengan tarif yang dilihat dari sisi operator berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK)?
2. Bagaimana tarif kondisi saat ini dengan tarif yang dilihat dari segi pengguna berdasarkan *Ability to Pay (ATP)* dan *Willingness to Pay (WTP)*
3. Bagaimana sebaiknya penetapan tarif pada layanan angkutan perkotaan di Kota Parepare?

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan riset terhadap evaluasi tarif angkutan perkotaan di Kota Parepare sebagai wilayah studi.

b. Tujuan

Tujuan dari penelitian evaluasi tarif Angkutan Perkotaan di Kota Parepare sebagai berikut:

1. Menganalisis tarif eksisting apakah sudah sesuai jika dilihat dari sisi operator.

2. Mengetahui berapa tarif yang sesuai jika dilihat dari segi pengguna jasa.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi dengan trayek angkutan perkotaan yang berada di wilayah Kota Parepare.
2. Penelitian ini hanya melakukan kajian terkait perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan perkotaan dan perhitungan tarif berdasarkan kemampuan untuk membayar (*Ability to Pay*), dan keinginan orang untuk membayar (*Willingness To Pay*)
3. Perhitungan biaya operasional kendaraan pada penelitian ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/BLJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur.
4. Penelitian ini hanya membandingkan tarif yang dilihat dari tiga sisi yaitu sisi operator, pengguna, dan regulator yang bertujuan sebagai gambaran untuk pemerintah dalam penetapan tarif angkutan perkotaan di Kota Parepare